

Bab 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

NGO dalam beberapa dekade mengalami perkembangan yang sangat signifikan, dimana NGO di banyak Negara berkembang berkiprah di program-program primer pemerintah, yaitu Kesejahteraan, Kesehatan dan Pendidikan. di mana program ini seharusnya menjadi tanggungjawab Negara sepenuhnya, tetapi kenyataannya di banyak Negara berkembang pemerintah selalu tidak bisa memenuhinya dengan sempurna hak-hak dasar warga Negaranya itu, kasus ini banyak di jumpai seperti Indonesia, dimana kemiskinan, pelayanan kesehatan yang buruk dan banyaknya anak usia dini yang putus sekolah banyak di temukan hampir di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Ibu Kota Jakarta yang notabennanya dekat dengan pemerintah pusat. Kecolongan pemerintah inilah menjadi perhatian utama NGO untuk membantu menuntaskan kebutuhan-kebutuhan riil masyarakat.

Tidak tertutup kemungkinan bidang politik, krisis, konflik, dan demokrasi juga tidak luput dari sorotan NGO. dimana pemerintahan di banyak Negara berkembang masalah demokrasi, kestabilan politik, dominasi militer, diskriminasi rasial, kesenjangan ekonomi maupun social, dan merebaknya konflik di mana-mana, menjadi bagian keseharian yang banyak terjadi di Negara-Negara berkembang. Factor inilah yang paling banyak mengundang NGO untuk ikut terlibat di dalam menangani kasus-kasus yang selalu mencuat di banyak Negara berkembang di seluruh dunia.

NGO berkembang pesat di era tahun 1970-an setelah di pengaruhi oleh sejumlah konfrensi PBB, terutama di Negara-Negara berkembang yang kecendrungan demokrasiya terabaikan dan terjadi berbagai krisis kemanusiaan seperti kemiskinan, sanitasi yang buruk, dan hak-hak dasar warganya yang di abaikan oleh Negara.

Fakta ini mengundang peran NGO melakukan tindakan nyata untuk melayani serta berusaha memenuhi hak-hak dasar masyarakat itu.

Merebaknya NGO sejak tahun 1970-an menandai perubahan wacana baru dalam pembangunan Internasional (International Devlopment). Seperti yang telah kita sebutkan diatas bahawasanya baik di Negara Maju seperti Amerika Utara, Eropa, Amerika latin, Asia, Negara-Negara berkembang di Afrika , dan di Negara-Negara bekas blok Uni Soviet orang-orang membentuk asosiasi, yayasan, dan Institusi serupa untuk melaksanakan aktifitas kolektif. Edwar mencatat dari sejumlah 176 NGO Internasional tahun 1909 telah berkembang hingga mencapai jumlah 28.900 menjelang tahun 1993. lebih dari 20.000 jaringan NGO Internasional telah aktif di panggung dunia dan 90% di antaranya di bentuk pada kurun waktu tiga dekade terakhir¹.

Banyaknya NGO terbentuk hanya untuk merespon meningkatnya bantuan asing yang di salurkan melalui NGO. Merebaknya NGO bukan sesuatu hal yang kebetulan hanya untuk merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal, namun derasnya mengalir bantuan Asing melalui NGO menjadi sebuah perlombaan tersendiri bagi sebagian orang untuk membentuk berbagai Asosiasi dan komunitas untuk mengelola uang itu.

Untuk mendukung proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi di Negara-Negara berkembang. Negara donor seringkali memberikan bantuan melalui komunitas sipil atau NGO, bantuan ini di berikan dalam waktu yang lama sehingga memungkinkan NGO menjadi agen pembangunan jangka panjang di dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat di Negara-Negara berkembang. Peran NGO tentu saja tidak hanya di lihat sebatas sebagai Asoosiasi masyarakat yang bergelut di bidang Advokasi saja saat ini, namun mereka juga layak di katakan sebagai Agen pembangunan yang cukup banyak mengambil alih tugas rutin Pemerintah.

Meledaknya NGO saat ini, yang menjadi mitra Negara donor telah menjadi lembaga ini sebagai garda terdepan dalam setiap krisis yang terjadi di kawasan, bencana alam, konflik, krisis politik tidak di bukanya demokrasi bahkan Negara yang bertindak sewenang-wenang atas warga Negaranya tak luput menjadi perhatian NGO untuk masuk di wilayah itu baik bertindak sebagai spionase maupun agen advokasi investigasi terhadap kasus-kasus yang sangat sensitive seperti pelanggaran HAM maupun Pemerintahan yang korup dan represif.

Begitu juga dengan bencana alam yang terjadi di banyak Negara, banyak NGO yang secara tiba-tiba berubah haluan, dari yang sebatas melakukan aktifitas advokasi-advokasi, perdamaian, demokrasi dan terciptannya masyarakat yang partisipatif, tiba-tiba ikut andil di dalam proses-proses program kemanusiaan untuk para korban bencana alam. Dinamika ini tidak lain dan tidak bukan adalah di sebabkan oleh metamorfosis mereka yang mengatakan diri mereka sebagai agen pembangunan untuk mengisi keluputan pemerintah di dalam memberikan

Bencana alam, Tsunami yang terjadi di Aceh pada tanggal 26 desember 2004, menjadi contoh yang bisa kita saksikan secara bersama-sama dimana banyak NGO yang berubah haluan, yang dulunya mereka sibuk mengurus masalah lingkungan tiba-tiba mengurus pembangunan rumah, sanitasi, dan pemberian bantuan langsung ke masyarakat WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), misalnya yang dikenal banyak kalangan sebagai lembaga advokasi Lingkungan hidup.

Tidak seorangpun yang mengatakan tidak, bahwa Bencana alam Tsunami yang terjadi di Aceh NGO paling mendominasi, didalam merespon Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh, baik emergensi respon maupun Rekontruksi. mereka berasal dari berbagai Negara, termasuk dari Negara yang secara geografis sangat jauh dengan Aceh, tetapi itu bukan menjadi hambatan. Menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana peran mereka dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh pasca Tsunami khususnya JRS (*Jesuit Refuges Service*). kenyataan di lapangan terlihat ada 400 NGO Internasional, ratusan NGO Nasional, Ormas dan Partai Politik yang terlibat langsung di lapangan baik pada saat evakuasi jenazah maupun tahap proyek jangka panjang². namun penulis tidak meneliti semua NGO, Ormas dan partai Politik yang terlibat di proyek kemanusiaan ini, hanya mengangkat JRS saja karena penullis memakai metode studi kasus.

Tanggal 26 desember 2004 adalah hari yang paling berduka, di Aceh yang berganti namanya menjadi Nanggroe Aceh Darusalam. Wilayah ini yang letaknya di ujung barat pulau Sumatera, di hantam gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat gempa bumi 8.9 skala richter tersebut di awal gelombang laut...

adalah di luar prediksi dan perkiraan para pakar geologis dan metafisika pada saat itu.

Aceh dengan sebutan daerah Serambi Mekah ini, tak luput dari segala pertumpahan darah dan air mata, gejolak konflik Aceh yang berkepanjangan, dari penjajahan Belanda, Jepang, DI/TII sampai meletusnya pemberontakan GAM pada tahun 1976 merupakan titik sejarah Aceh yang kelabu. Tanah yang di huni 4 juta jiwa ini selalu di landa malapetaka yang tiada habisnya.

Aceh menjadi tempat yang nyaman untuk di huni kembali setelah konflik itu berakhir diatas kertas yang di tandatangani pada tanggal 15 agustus 2005 kedua pihak (GAM-RI) di Helsinki Finlandia sepakat untuk mengakhiri pemberontakan secara permanen, kesepakatan itu membawa Aceh ke perubahan yang sangat signifikan, menuju pembangunan Aceh yang adil dan bermartabat.

Tsunami pada tanggal 26 desember 2004 tersebut merupakan bencana alam yang terbesar yang terjadi di dunia dalam abad ini, kekuatan gempa yang terjadi di samudra Hindia atau berjarak 149 km sebelah barat Meulaboh Aceh, itu terpantau oleh Global Seismic Global Network sebesar 8,2 mw (moment magnitude). Sementara itu data Seismograf di Pusat Gempa Nasional (PGN) Jakarta menunjukkan bahwa gempa hari itu berkekuatan 8,6 skala richter. Namun laporan CNN menyebutkan, kekuatan itu mencapai 8,9 richter, sedangkan jaringan televise BBC merujuk angka 8,5 skala richter³.

Menurut DR Prih Haryadi, kepala pusat system data informasi Geofisika (BMG) , gempa Tektonik pernah terjadi di Cile pada tahun 1960 dengan kekuatan 9,5 mw. Setelah itu, pada tahun 1964 terjadi gempa berintensitas 8,5 mw di

Alaska. Gempa berskala besar tersebut menimbulkan patahan berdimensi ratusan kilometer jaraknya dari pusat gempa hingga memicu gempa lain. Gempa di Aceh memicu dampak kegempaan hingga radius 200 kilometer hingga memicu gempa di kepulauan Nikobar di sebelah utara pusat gempa pada jarak 550 kilometer serta mengguncang pulau Andaman.

Gempa dan gelombang Tsunami Aceh itu telah menghilangkan ratusan ribu korban jiwa dan materi yang begitu besar, kekuatan gempa dengan sedahsyat itu telah merusak berbagai infrastruktur public dan milik pribadi dimana korban yang meninggal 115.637 jenazah, hilang 132.172 jiwa, yang mengungsi, 394.285 jiwa. Sementara data kerusakan 1,3 juta rumah rusak, 8 pelabuhan, 4 depot BBM, 85% sarana air bersih 92% sarana sanitasi 120 KM jalan, 18 jembatan, 20% jaringan listrik.⁴

Inventarisasi kerusakan yang begitu besar telah membawa dampak ke segala sector kehidupan masyarakat, lumpuhnya Pemerintahan, Ekonomi dan masyarakat mengalami keguncangan hebat merupakan sebuah fakta yang tidak bisa terelakkan. Keadaan ini memancing simpati dari masyarakat local, Nasional bahkan Dunia Internasional. Bantuan berdatangan dari seluruh Nusantara, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Palembang, Jakarta sampai di Yogyakarta. di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya Pemerintah Pripinsi berkerja sama dengan Komite kemanusiaan Aceh (KKA) mengirimkan ratusan relawan untuk proses evakuasi jenazah dan di susul dengan berbagai jenis makanan dan pakaian layak pakai, dari data Komite kemanusiaan Aceh (KKA). sumbangan masyarakat yang terkumpul melalui lembaga ini saja mencapai 1 miliar lebih dimana yang Da

600 juta, pakaian layak pakai 3000 karung, mie instant 600 kardus, susu, makanan bayi, biscuit, air minum dan obat-obatan. Dan belum lagi di tambah sumbangan dari pemerintah DIY sendiri dan berbagai posko-posko kemanusiaan lainnya yang di bangun secara sukarela oleh lembaga, mahasiswa dan masyarakat.

Sumbangan masyarakat Internasional merupakan sebuah rekor baru dalam proyek kemanusiaan yang terjadi di Aceh, di mana melalui PBB (United Nation), hampir seluruh lembaga donor di Dunia tertuju membantu Aceh, Emergensi Respon sampai dengan proses Rehabilitasi dan Rekontruksi dilakukan dengan bantuan perantara NGO dan pemerintah pusat sendiri, Peran NGO merupakan sesuatu yang tak bisa terelakkan, seperti yang telah kita kemukakan di atas NGO saat ini menjadi corong Negara-Negara donor dan masyarakat Internasional khususnya di Negara-Negara maju, telah bergerak menuju agen besar dalam proyek kemanusiaan tersebut.

Begitu juga dengan kehadiran JRS (Jesuit Refugees Service) sebuah NGO yang bergelut dalam masalah-masalah pengungsi juga tidak tertinggal dalam berpartisipasi membawa dolarnya untuk korban Tsunami, JRS lembaga katolik yang berbasis di Roma mulai menangani proyek-proyek kemanusiaan di sejumlah Negara Afrika dan di Negara-Negara yang di landa konflik dan kemiskinan, dan untuk membantu para korban perang di seluruh dunia, begitu juga dengan kehadiran mereka di Aceh sudah dimulai sejak membludaknya pengungsi Aceh ketika situasi Aceh semakin panas dan pertempuran dimana-mana.

Begitu juga, ketika tsunami menerjang wilayah Aceh, JRS mengembangkan peran mereka untuk ikut terlibat dalam Rehabilitasi dan

persiapan jangka menengah dan panjang. Dengan berbagai program yang di jalankan menarik untuk di simak bagaimana program yang di lakukan di lapangan sehingga memberikan gambaran bagi kita dan penulis bagaimana NGO, khususnya JRS berperan di Aceh.

Dimana JRS pada awalnya hanya menangani masalah-masalah pengungsian di Timor Leste dan sekitarnya, dan beberapa wilayah di Maluku, kita tahu semuanya bahwa masyarakat di wilayah itu yang notabennya adalah pemeluk Nasrani dengan sesungguhnya JRS sebagai lembaga katolik merupakan sebuah konsekuensi logis bagi seagama untuk ikut berperan aktif ketika orang lain tidak mau aktif.

Namun Aceh dengan masyarakat terlahir sebagai penganut Islam terbesar di Indonesia, merupakan fakta lain yang menarik untuk di lihat, dimana JRS sebagai lembaga Katolik yang berperan di bidang pengungsi dan rohani ikut ambil bagian di daerah Serambi Mekkah tersebut yang masyarakat nya dikenal sangat fanatic dengan keIslamannya. Keadaan ini tentu saja menarik untuk di lihat lebih jauh khususnya penulis, dimana JRS bisa berperan di Aceh. Dengan sesungguhnya akan memberikan gambaran juga bagi kita bahwa Aceh di popolerkan selama ini sebagai penganut Islam paling fanatic ternyata juga bisa menerima setiap perbedaan yang ada termasuk dengan JRS, walaupun mereka berelatarbelakang Katolik tetapi toh kalau tujuan kemanusiaan tidak ada persoalan dengan masyarakat disana.

Barangkali Penulis berfikir mengangkat tentang peran JRS di Aceh juga nantinya akan memberikan sedikit gambaran bagaimana tanggapan masyarakat Aceh tentang kehadiran lembaga-lembaga kemanusiaan yang berlatar belakang

agama khususnya (non- Muslim) di Aceh, sehingga tentu saja akan sangat berguna untuk peneliti-peneliti yang lain yang ingin sedikit membandingkan tentang tingkahlaku dan pendapat masyarakat Aceh selama ini terhadap komunitas-komunitas non- Muslim.

Namun perlu penulis tegaskan di sini adalah, karena karya ilmiah ini tidak melakukan penelitian secara Kuantitatif dimana perbandingan antara NGO yang berlatarbelakang agama dan tidak berlatar belakang agama, jadi di dalam karya ini hanya menjabarkan secara kualitatif peran yang di lakukan oleh JRS, dimana penulis berharap informasi ini dapat memberikan sedikit gambaran bahwasanya apa yang di lakukan oleh JRS di sana ternyata tidak bertentangan dengan kehidupan social masyarakat Aceh.

B. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
Bagaimana peran JRS (Jesuit refuges service) dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh pasca Tsunami pada tahun 2004-2005?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan manfaat diharapkan mampu memberikaan gambaran peran NGO JRS di dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh, dimana nantinya bisa menjadi sebuah tolak ukur bagaimana sesungguhnya peran NGO khususnya JRS dalam Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh pasca Tsunami.

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis dan teoritis secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

*** Manfaat Secara Praktis:**

- a. mengetahui bagaimana peran JRS dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca Tsunami
- b. bisa menjadi standar dalam ukuran menggambarkan kinerja NGO khususnya JRS dalam proses-proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh.
- c. Membuka wawasan baru, sikap kritis dan menumbuhkan rasa kepedulian social pada masalah-masalah kemanusiaan.
- d. Memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana dalam ilmu social dan politik dengan spesialisasi ilmu pemerintahan.

*** Manfaat Secara Teoritis :**

- a. dapat mengembangkan kemampuan penulis secara khusus dan mahasiswa secara umum untuk mengkaji permasalahan social.
 - b. Sebagai referensi, khususnya tentang peran NGO JRS di Aceh bagi pengembangan penelitian sejenis di masa mendatang.
 - c. Memberikan informasi bagi masyarakat di masa mendatang mengenai
- — — — — di Indonesia JRS dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah proposisi-proposisi yang sudah di uji dan bisa menjelaskan gejala-gejala yang ada. Teori tidak lain adalah pernyataan yang umum atau proposisi yang berlaku umum, berfungsi untuk menjelaskan hubungan factor-faktor yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Menurut Prof. Miriam Budiarmo dalam bukunya dasar-dasar ilmu politik. Teori adalah Generalisasi yang abstrak yang mengenai beberapa fenomena. Sehubungan dengan itu konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Peran

Peran merupakan seperangkat perilaku dari orang yang memiliki posisi tertentu di kelompok sosial, namun di sini lebih menekankan bagaimana peran organisasi tersebut khususnya NGO dalam fakta social di lapangan. Menurut Jack C. Plano, Robert E. Riggs, dan Helena S. Robin peran merupakan seperangkat perilaku yang di harapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social⁵. Di samping itu menurut sumber yang lain peran memiliki definisi yang tidak jauh berbeda namun memiliki aspek social yang lebih mudah di mengerti secara sosiologis.

Misalnya Astrid S. Susanto mengemukakan bahwa peran memiliki tiga hal:

- a. peranan adalah meliputi norma-norma yang di hubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini

⁵ Jack C. Plano, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, *Kepercayaan politik dan politik internasional*

merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan bermasyarakat.

- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat di lakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.
- c. Peranan dapat juga di artikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial⁶

Artinya kita bisa berperan secara individu dan berperan secara organisasi. dengan sesungguhnya menganalogikan kita bahwa sesuatu menyangkut dengan konsep yang kita tawarkan terhadap sesuatu persoalan dan fenomena yang terlihat untuk menyelesaikan itu. Konsep itu kemudian kita kembangkan menjadi bagian tertentu dalam aturan-aturan yang kita sepakati atau kita tentukan untuk menyelesaikan persoalan itu, misalnya NGO JRS ini di dalam menyediakan jasa kemanusiaannya untuk para pengungsi dan korban Tsunami tentu saja mereka mengembangkan konsep yang di miliki dan kemudian di implementasikan konsep itu, itulah kemudian di sebut Peran.

Peran ini yang kemudian akan kita bicarakan lebih jauh terhadap program-program kerja mereka di dalam mengatasi persoalan-persoalan masyarakat pasca tsunami, di Aceh. peranan itu meliputi berbagai bidang seperti pemberdayaan masyarakat, pelayanan pengungsi, pendidikan dan juga menyangkut dengan kesehatan.

⁶ Aritid S. Suroto, konsep-konsep sosiologi dan perubahan sosial kita, Jakarta, 1992, hal. 05

2. NGO (Non Government Organisation)

2.1 Definisi NGO

Entitas NGO sangat beragam, dan karenanya perlu penjelasan tentang Organisasi yang bisa dikategorikan NGO. Istilah NGO di gunakan sejak 1945 ketika PBB dalam piagamnya perlu membedakan antara berpartisipasi untuk agen-agen khusus antar pemerintahan dengan hak berpartisipasi untuk Organisasi Privat Internasional⁷.

“Gordenker dan Weiss mendefinisikan NGO sebagai Organisasi privat yang terpisah dari Pemerintah tetapi aktif dalam isu-isu social, bersifat nirlaba, dan mempunyai ruang lingkup Internasional”. Arti lain NGO adalah Organisasi yang bersifat sukarela privat (Privat Voluntary Organisation- PVO). Istilah PVO lebih lazim di gunakan di Amerika Serikat untuk menyebut agen non pemerintah, nirlaba tidak di kenakan pajak yang melakukan pelayanan di luar Negri dengan tujuan menyalurkan bantuan dan pembangunan.

Secara garis besar NGO merupakan lembaga perantara, yang memiliki cabang-cabangnya di banyak Negara, dan biasanya berpusat di Negara maju atau memiliki mitra kerja di banyak Negara. NGO dalam orientasi di lapangan menurut Bank Dunia terbagi dalam dua aspek yaitu bagian pembangunan, yang membiayai proyek-proyek infrastruktur di Negara-negara berkembang, dan NGO yang bergerak di bidang advokasi kasus-kasus, partisipasi, untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah di Negara-negara yang tidak menganut sistem demokrasi dan sistem pemerintahannya dan tidak mencerminkan Good Governance (tata pemerintahan yang baik).

2.2 Peran dan fungsi NGO

Seperti yang telah kita bicarakan di atas, bahwasanya NGO atau di Negara maju di sebut dengan istilah PVO, merupakan organisasi nirlaba yang bergerak didang pembagunan dan advokasi hak dasar warga Negara (kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan).

NGO sebagai wacana baru saat ini di dalam proses pembangunan di Negara miskin, Negara berkembang, daerah bencana , daerah konflik, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari peran-peran NGO di dalam mengatasi krisis, mereka selalu berada di tengah-tengah keadaan krisis di kawasan. dimana bencana alam di Aceh menjadi contoh kongkrit NGO hadir dengan keterlibatan sejumlah orang terdidik yang berpengalaman bergabung atau membentuk asosiasi sendiri, tetapi tetap menjadi corong lembaga-lembaga donor Internasional.

Bencana alam di Aceh menjadi contoh kongkrit bahwa NGO paling mendominasi di dalam proyek kemanusiaan di Aceh, walaupun dengan berbagai kepentingan dan ukuran efisiensi yang mereka buat sesuai dengan selera. Peran NGO di Aceh memberikan respon positif tersendiri untuk membantu perkerjaan pemerintah . kehadiran mereka di sana menjadi sejarah tersendiri NGO bagaikan sebuah unit pemerintahan yang memiliki banyak uang dan isi oleh orang-orang yang cukup berpengalaman.

Peran dan fungsi NGO, barangkali Aceh dapat menjadi salah satu contoh yang bisa kita lihat secara dekat, berbagai proyek kemanusiaan mulai mereka tangani. Emergensi respon dengan berbagai latar belakang NGO, baik medis, perdamaian, lingkungan maupun khusus penyuplai kebutuhan makanan dan sandang. Aksi mereka bisa dikatakan melahiki dari kerja kerja pemerintah, hanya

hari menjelang terjadinya bencana dahsyat tersebut, NGO mulai berdatangan ke Aceh, seketika itu penulis juga berada di Aceh, dan menyaksikan secara langsung, dimana mereka mulai mengontrak rumah-rumah penduduk untuk di jadikan markas mereka. tidak heran juga mereka mengontrak gudang-gudang makanan dengan skala besar. mereka juga mencari transportasi barang dengan kapasitas besar seperti Truck Intercooler besar dan lain sebagainya. Untuk mengangkut makanan dan bantuan lainnya, yang akan di suplai ke barak-barak pengungsi. Di samping itu tenaga medis juga tidak ketinggalan dari mereka, mereka juga membangun rumah sakit darurat dengan peralatan di angkut dari Negara asal mereka atau mereka mempersiapkan segala kebutuhan sebelum terjun ke Aceh.

Hampir segala kebutuhan darurat di tangani oleh NGO, mereka saling berebut untuk membantu para korban. Masyarakat kadang-kadang mendapat bantuan secara ganda menjadi hal yang biasa pada saat itu, banyaknya NGO yang hadir disana dan peran mereka yang begitu tinggi nyaris pemerintah tidak terlihat, walaupun seharusnya ini menjadi tanggung jawab pemerintah.

2.3 Sistem kerja NGO

NGO di dalam menyusun langkah-langkah implementasi program, barangkali di kenal tidak begitu birokratis karena NGO memakai pola manajemen yang ramping dan tidak begitu gemuk. Ini di sebabkan karena NGO tidak terikat dengan berbagai system seperti dalam sebuah Negara. Misalnya proses pengesahan anggaran saja di dalam sebuah Negara harus melalui mekanisme

parlemen, dan begitu juga pertanggungjawabannya harus mencakup semua elemen yang terkait.

NGO tidak mengenal parlemen dalam pengesahan anggaran untuk membiayai sejumlah program yang telah di sepakati oleh organisasi. NGO hanya bertanggung jawab terhadap penyandang dana. Mekanisme ini memberikan NGO lebih leluasa dalam mengatur administrasinya .

Di dalam NGO sendiri di dalam prakteknya hanya memakai standar orientasi hasil, sehingga proses bagi mereka bukan sebagai ukuran yang mereka pertimbangkan, NGO biasanya di bentuk di dalam beberapa wilayah kerja dan saling berhubungan satu sama lain. NGO biasanya memiliki kantor pusat di sebuah Negara (biasanya di Negara maju) dan memiliki cabang di banyak Negara.

Masing-masing cabang tersebut akan menyusun program masing-masing sesuai dengan keadaan dimana NGO itu berada. Misalnya perwakilan NGO di Indonesia, program mereka focus ke proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh. Mereka menyusun sejumlah program, kemudian di ajukan ke kantor pusat untuk pengesahan anggaran, setelah anggaran di setuju mereka akan menyelesaikan program itu.

Dalam menyelesaikan program biasanya mereka terbagi di dalam bentuk masing – project dan di koordinir oleh seorang manajer dan di perbantukan oleh beberapa staf administrasi. Clark mengaskan bahwa NGO di dalam melakukan replikasi proyek di lapangan ada beberapa cara yang sering di terapkan

Rekrutmen, Pelatihan dan Magang

NGO melakukan rekrutmen sejumlah valountir kalau menangani proyek dalam jumlah besar, sejumlah calon staf tersebut biasanya sebelum di terjunkan ke lapangan akan di berikan sejumlah pelatihan, magang di sejumlah lembaga yang menawarkan jasa-jasa *capacity building* , Clark menyebutkan sebuah contoh di Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) yang berdiri pada tahun 1972 pada masa perjuangan kemerdekaan melawan Pakistan, sekarang telah menjadi NGO terbesar di dunia ketiga, lebih dari 2000 staf di perkerjakan . begitu juga dengan organisasi Bangladesh lainnya, porsshika misalnya telah memperkuat NGO di Negara itu dengan mengadakan sejumlah pelatihan⁸.

Capasitas manajemen

Di dalam sebuah organisasi Nirlaba manajemen merupakan sebuah hal sangat signifikan, walaupun kadang-kadang banyak organisasi yang anti dengan sedemikian cara-cara manajemen yang sedikit memakai system demokrasi, di dalam NGO biasanya mereka memakai system manajemen cepat saji, dan diisi oleh orang-orang yang terdidik dan berpengalaman di bidangnya.

Jaringan

Di banyak Negara NGO saling berkompetisi di dalam menjalin kerjasama dengan berbagai NGO di belahan bumi, mereka melakukan ini tidak lain adalah saling menukar pengalaman untuk menguatkan kapasitas masing-masing organisasi mereka, sehingga mereka biasanya dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang di ambil dari mitra-mitra mereka.

⁸ John Clark, *NGO dan Pembangunan di Bangladesh* (1995) Hal. 104, 110

Menarik Diri

Memang ini sesuatu yang sulit dilakukan oleh banyak NGO, karena factor ketergantungan masyarakat, tetapi dewasa ini NGO sebelum terjun kemasyarakat yang paling di perhatikan adalah bagaimana masyarakat tidak tergantung dengan pemberdayaan yang di berikan oleh organisasi mereka, mereka berusaha membuat masyarakat agar bisa mandiri, dan biasanya NGO yang bergerak di bidang kesejahteraan social memakai target bagaimana rakyat bisa mandiri dan mereka sewaktu-waktu bisa meninggalkannya.

Penyebaran pengalaman

Biasanya NGO saling berbagi pengalaman antar lembaga bahkan dengan pemerintah setiap proyek yang berhasil mereka kerjakan, mekanisme ini sungguh memberikan hal yang sangat positif di dalam menciptakan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang, bagi setiap stakeholder di manapun.

2.4. hubungan NGO dengan Pemerintah

NGO dan pemerintah masing-masing memiliki keunggulan dalam menjalankan pembangunan, keunggulan ini kadang bisa melengkapi kalau di kolaborasikan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Namun kenyataan di lapangan mengatakan lain, terkadang NGO yang di percayakan oleh pemerintah sering bersikap ragu-ragu untuk bertindak, karena factor kepercayaan antara NGO pemerintah sangat lemah. disini kita perlu melihat NGO dan pemerintah bukan sekedar sebagai organisasi yang melaksanakan suatu fungsi, tetapi juga sebagai organisasi manusia yang di dalamnya mempunyai identitas, tujuan dan terutama

... ..

cara pandang sendiri-sendiri tentang dunia sekelilingnya, serta peran yang harus mereka mainkan dalam pembangunan. Oleh karena itu ketika kedua pihak harus berinteraksi, problem kekuasaan akan selalu muncul dan mempengaruhi sifat dan dinamika hubungan mereka⁹.

Biasanya NGO sangat kritis terhadap pemerintah, dimana NGO menganggap pemerintah sebagai sesuatu penguasa yang memakai cara paksaan dalam mencapai keinginan-keinginan, NGO mendekati pemerintah ketika saat membutuhkan pemerintah biasanya dilakukan ketika NGO membutuhkan kelonggaran izin, baik untuk menjalankan programnya maupun izin tinggal ataupun pembentukan NGO baru.

Ketegangan yang paling banyak timbul, ketika NGO memakai cara-cara yang berseberangan dengan pemerintah di dalam menjalankan proyeknya, partisipasi dan demokrasi merupakan dua hal penting yang sering dilakukan NGO dalam setiap kegiatan sosialnya, hal ini sangat di khawatirkan oleh pemerintah di Negara-negara selatan karena bisa menghambat pemerintah di dalam menjaga kestabilan politik dalam sebuah negara di mana rakyat bisa menentang pemerintah di dalam waktu seketika karena kesadaran politik dan tumbuhnya demokrasi.

Di samping itu pemerintah juga menilai NGO bukan lah satu-satunya agen pembangunan yang tepat didalam wilayah kerja-kerja pembangunan masyarakat. Bahkan pemerintah beraanggapan bahwa NGO lebih mengejar proyek ketimbang hasil dan mangfaat yang ingin di capai. Keadaan ini mencerminkan pemerintah harus mengontrol NGO, dalam beberapa analisis mengatakan bahwa pemerintah

seringkali menganggap NGO sebagai lembaga yang sering membuat pemerintah tidak stabil di dalam menjalankan politiknya dan pembangunan ekonomi, dimana NGO sering mengatakan bahwa pemerintah sering bersikap korup, represif dan kapitalis untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Namun dalam beberapa dasawarsa keadaan ini berubah, hubungan NGO – pemerintah mengalami pasang surutnya, dimana pemerintah juga membutuhkan NGO, dalam beberapa proyek pembangunan, peran NGO di Aceh pasca tsunami merupakan sebuah fenomena, dimana pemerintah membutuhkan peran NGO lebih banyak di dalam menata kehidupan masyarakat, begitu juga yang terjadi di Etiophia pemerintah tidak pernah menolak kehadiran NGO-NGO yang membantu pemberantasan kemiskinan, begitu juga yang terjadi di Chile pada masa pemerintahan Pinochet yang di kenal paling banyak melakukan kejahatan kemanusiaan, tetapi juga tidak menolak kehadiran NGO untuk membantu masyarakat miskin¹⁰.

Fenomena itu memberikan kita benang merah bahwa dua stakholder tersebut merupakan dua kelompok kepentingan yang sama-sama mengatakan dirinya sebagai agen pembangunan perubahan social yang memiliki cara pandang yang berbeda-beda di dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Perbedaan itulah yang seringkali membuat hubungan NGO dan pemerintah kadang-kadang berada di titik krisis, tetapi juga kadang-kadang memberikan gambaran positif pula.

¹⁰ John Clark, NGO dan pembangunan demokrasi, *Tempo* Wacana (1995) hal. 81-85

2.5 Klasifikasi NGO

Menurut David C. Corten dalam bukunya menuju Abad ke 21 disebutkan bahwa NGO memiliki empat Generasi, yang masing-masing generasi tersebut telah berkembang di masanya masing-masing. Corten melihat NGO di sini telah berkembang dengan berbagai latar belakang paradigma dari mengurus masalah-masalah pengungsian sampai dengan mengurus Negara. empat generasi itu adalah:

Generasi Pertama:

NGO di generasi pertama ini di lahirkan dari latar belakang membantu korban peperangan dan bencana alam serta untuk memeberikan pelayanan kepada orang-orang miskin .kelompok agamawan berada di garis tedepan di dalam usah-usaha ini.

Pada tahun 1647,kaum Protestan Irlandia mengirim makanan ke Amerika Utara untuk membantu para pendatang yang menjadi korban perang dengan suku Indian.sepanjang abad ke 17 dan 18 usaha amal swasta Inggris memberikan bantuan ke Amerika untuk mendukung para misionaris dan sekolah-sekolah untuk orang Indian,Negro dan kulit Putih miskin,di samping membantu sekolah-sekolah tinggi dan masyarakat terpelajar di lingkungan orang-orang kaya.

Pada tahun 1973,kelompok-kelompok swasta di Amerika Serikat memberikan bantuan sukarela kepada para pengungsi yang melarikan diri kekacauan revolusi di Santo Domingo pada tahun 1800-an,beberapa kelompok bantuan Internasional dan Masyarakat misionaris didirikan di Eropa dan Amerika,termasuk Palang Merah.

Perang dunia I menyaksikan peningkatan besar-besaran dalam prakarsa swasta Internasional dengan nilai bahan pangan yang di sumbangkan ke Eropa

oleh badan-badan amal Amerika Serikat mencapai \$250 juta per tahun. badan tertua di Inggris Save the Children Fund, didirikan pada tahun 1919.

Banyak di antara NGO Internasional masa kini awalnya didirikan untuk membantu para korban perang dunia ke II di Eropa. termasuk di dalamnya Catholic Relief Services, CARE, OXFAM, UK dan the Danish Association for International Cooperation. setelah keadaan di Eropa semakin membaik organisasi-organisasi ini mulai memalingkan perhatiannya ke Negara-negara selatan. perhatian istimewa di berikan untuk membantu orang-orang yang melarikan diri karena pertentangan politik di Cina, India, Korea dan Timur Tengah.

Berdasarkan dari argumen diatas bahwa NGO generasi pertama lahir lebih disebabkan oleh faktor untuk membantu korban perang dan bencana alam. program-program yang di jalankan juga lebih bersifat hanya memberikan Logistik kepada para korban-korban tersebut. ruang lingkup yang di berikan tidak dalam skala besar namun hanya untuk perorangan dan keluarga.

Generasi Kedua:

Strategi-strategi generasi kedua memusatkan energi NGO untuk membina kemampuan Rakyat agar bisa memenuhi kebutuhannya sendiri dengan lebih baik melalui tindakan-tindakan lokal yang mandiri. karena mereka sangat memperhatikan keberlanjutan, maka strategi generasi kedua yang benar akan memiliki konsep yang bersifat pembangunan dan seringkali di sebut sebagai strategi pembangunan masyarakat. biasanya tindakannya meliputi kegiatan-kegiatan membantu diri mereka sendiri pada tingkat Desa, seperti pembentukan panitia kesehatan untuk melakukan upaya pencegahan penyakit, memperkenalkan

masyarakat, menggali sumur, membangun jalan untuk angkutan, dan sebagainya. yang di pentingkan adalah mengandalkan kemampuan lokal, dengan tujuan agar hasilnya bisa di lanjutkan dengan swadaya masyarakat sesudah berakhirnya masa bantuan NGO.

Dari penjelasan diatas NGO generasi kedua adalah lebih bersifat untuk memberdayakan masyarakat-masyarakat dalam skala Desa atau RW. metode yang di gunakan oleh NGO generasi kedua adalah lebih mengedepankan pemangfaatan sumber daya lokal, dan pelibatan masyarakat secara penuh.

Generasi Ketiga:

Strategi-strategi generasi ketiga memandang melampaui masyarakat satu persatu dan berusaha mencari perubahan dalam pranata dan kebijakan khusus pada tingkat lokal, Nasional dan Global. keputusan untuk menerapkan strategi-strategi generasi ketiga seringkali timbul karena rasa frustasi terhadap keterbatasan strategi generasi kedua, sebab semakin di sadari bawa(1) manfaat yang di peroleh dari campur tangan di desa tergantung pada kehadiran NGO secara terus menerus dan tersedianya subsidi dari para donatur.(2) dengan bertindak sendiri NGO tidak pernah bisa mengharapkan bisa manfaat lebih dari beberapa tempat yang di pilihnya. prakarsa pembangunan Desa yang di pilihnya seringkali hanya bisa di pertahankan selama prakarsa ini di kaitkan dengan sistem pembangunan Nasional yang bersedia mendukung. karena sistem yang ada cenderung bersikap memusuhi daripada mendukung prakarsa semacam itu, perlu prakarsa semacam itu di ubah, karena NGO seringkali merupakan satu-satunya yang secara konsisten mendukung perubahan itu maka harus bersedia

memegang peran kepemimpinan yang lebih besar untuk bertindak sebagai katalisatornya.

Strategi NGO dalam Generasi ketiga lebih melihat melibatkan NGO dalam kerjasama dengan badan-badan Nasional utama untuk membantu mereka mengadakan reorientasi dalam kebijakan dan gaya kerja mereka dengan cara-cara yang memperkuat penguasaan lokal berlandaskan luas atas sumber daya yang ada. Strategi ini mencakup terciptanya peran yang lebih besar, sehingga memberikan pelayanan lokal yang esensial atas dasar berkelanjutan dan swadaya.

Strategi generasi ketiga lebih mengedepankan proyek dalam skala besar yaitu di lakukan dalam proyek jangka panjang dengan ruang lingkup wilayah dan Nasional.

Generasi ke empat:

NGO generasi ke empat lebih bersifat Nasional dan Global yang memiliki visi mobilisasi yang tidak terbatas dengan menggorganisir gerakan-gerakan rakyat. NGO ini juga memiliki jaringan yang luas dan besar sehingga memungkinkan NGO ini dapat melakukan konsolidasi secara Internasional.

Berkaitan dengan proyek NGO ini melakukannya dengan keterlibatan penuh di seluruh dunia. Dimana Negara menjadi faternya. Proyek yang di kerjakan melebihi proyek-proyek yang di lakukan oleh Negara sehingga memungkinkan juga NGO ini memiliki kekuatan baik di segi finansial sumber daya manusia melebihi daripada Negara Miskin¹¹.

¹¹ David C. Carter, *Yayasan Obor Indonesia 2003* hal. 190-205

2.6 Keragaman NGO di Indonesia

Bertolak dari NGO yang bersifat keanggotaan, perantara dan orientasi pembangunan, bagian ini akan mendeskripsikan keragaman organisasi yang dapat di golongkan sebagai NGO di Indonesia. Dalam memahami keragaman tersebut, akan bermanfaat kiranya merujuk pemetaan NGO tipe ini sebagaimana yang ada di Filipina. Costantino David (1998) membedakan empat tipe organisasi non keanggotaan, yaitu DJANGOs (Development, Justice and Advocacy NGOs), TANGOs (Traditional NGOs), FUNDANGOs (Funding Agency NGOs), dan MUNGGO (Mutant NGOs). Tipe-tipe NGO tersebut memiliki sifat-sifat tersendiri serta menentukan arah tujuannya dirinya sendiri.

NGO tipe DJANGOs lazim di sebut sebagai NGO pembangunan. DJANGOs melakukan perpaduan pelayanan langsung dan tidak langsung (modal, hukum, medis, riset, dan sebagainya) untuk masyarakat. Di Indonesia, DJANGOs di sebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), seperti pembangunan akar rumput, advokasi kebijakan, dan aktifitas lain-lain yang mendukung kemandirian masyarakat. NGO tipe ini mencakup kelompok advokasi lingkungan, institusi pelatihan, perhimpunan konsumen dan yayasan lainnya yang berorientasi pembangunan. Meskipun dengan latar belakang, pandangan organisasi dan praktek yang berbeda-beda, namun mereka memiliki nilai dasar dan tujuan yang sama, yaitu mempromosikan keadilan dan pembangunan berkelanjutan, HAM, demokrasi dan pemberdayaan rakyat. Banyaknya NGO besar di Indonesia (Big Indonesia NGOs-BINGOs) dan NGO luar Negeri yang beroperasi di Indonesia

... dan di Indonesia antara LSM dan lembaga hukum sebagai yayasan

NGO seperti TANGOs biasanya membantu masyarakat miskin dan lemah yang tergantung kepada derma dan kemurahan hati. Di Indonesia, organisasi-organisasi yang melakukan aktifitas semacam ini di sebut sebagai organisasi kesejahteraan social. Sebagaimana di tetapkan di dalam UU kesejahteraan social No.6/ 1974, ORSOS mencakup organisasi lainnya yang didirikan Warga Negara di sector kesejahteraan social (USC Foundation,1997:35).organisasi tersebut menjalankan aktifitas penampungan anak cacat, orang jompo, dan sebagainya. Orsos di koordinasikan oleh BK3S (Badan Koordinasi Kesejahteraan social) di tingkat daerah,dan DNIKS (Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial) di tingkat Nasional.dua organisasi payung itu di bentuk oleh departemen social.

NGO tipe FUNDANGOs berfungsi sebagai organisasi pemberi dana (Granting Organization).FUNDANGOs memberi bantuan dan dana kepada NGO pembangunan dan kelompok masyarakat sipil lainnya.di Indonesia hanya sedikit NGO jenis ini, diantaranya adalah (Dana Mitra Lingkungan) dan Yayasan Kehati.

NGO tipe MUNGOS merupakan mutasi dari organisasi yang mempunyai semangat awal sebagai organisasi sukarela.pemerintah Indonesia juga membentuk NGO yang di sebut GRINGOs (government run and initiated NGOs), seperti PKK(Perkumpulan kesejahteraan keluarga), YTKI (Yayasan Tenaga kerja Indonesia) dan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan Golkar pada masa Orde Baru. Meskipun terdapat organisasi bisnis yang melaksanakan pembangunan social, kalangan bisnis juga bisa membentuk NGO sendiri untuk menghindari pajak,memadamkan gejolak buruh,atau sebagai alat untuk mendapat citra yang baik NGO yang demikian di sebut BONGOs (business organized

NGOs) atau CONGOs (commercial-organized NGOs) .di Indonesia BONGO di wakili oleh yayasan-yayasan yang didirikan oleh perusahaan swasta atau Negara seperti YMM (Yayasan Mitra mandiri, didirikan oleh united way Internasional), dan YDBA (Yayasan Dana Bhakti Astra, didirikan oleh perusahaan Astra). Tipe lain dari MUNGOs adalah COME N'GO (come and go NGO). NGO tipe ini benar-benar merupakan perusahaan NGO. mereka mendirikan organisasi jadi-jadian sekedar untuk mengajukan proposal dan kemudian menghilang bersama dana, dan atau mencari uang dengan memperkerjakan diri ke organisasi donor yang besar.

Karena eksistensi NGO diatur oleh Pemerintah, maka perlu di pahami bagaimana pemerintah mendefinisikan NGO. Pemerintah tidak pernah secara formal menggunakan istilah NGO. akan tetapi setidaknya di temukan tiga istilah untuk NGO dalam beberapa peraturan pemerintah yaitu: organisasi kemasyarakatan (didalam Undang-Undang organisasi kemasyarakatan -UU Ormas No.8/1985), organisasi kesejahteraan social (didalam UU tentang kesejahteraan social No.6 /1974) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di dalam instruksi Menteri dalam Negeri -N0 8/1990 tentang LSM. Organisasi kesejahteraan social mempunyai karakteristik yang spesifik yang diatur oleh UU atau PP secara khusus. Mengenai LSM, pemerintah tidak memberikan definisi yang jelas yang dapat di gunakan sebagai acuan dari tipe organisasi yang bisa di sebut LSM dan organisasi kemasyarakatan.

UU ormas N0.8/1985 menetapkan bahwa kecuali partai politik dan kelompok fungsional (GOLKAR), PNS, perusahaan dan koperasi yang diatur

dianggap sebagai organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ormas berarti "organisasi yang di bentuk secara sukarela" oleh warga Negara Indonesia berdasarkan kesamaan dalam kegiatan ,profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan tujuan untuk ikut serta dalam pembangunan Nasional yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional di dalam kerangka NKRI. Meskipun NGO menegaskan diri mereka sebagai lembaga yang tidak memiliki basisi keanggotaan dan didirikan sebagai yayasan dengan misi untuk meningkatkan swadaya masyarakat sehingga membuat mereka berbeda dengan organisasi lainnya, namun secara hukum berdasarkan UU ormas Pemerintah menempatkan NGO sebagai bagian dari Ormas.

Akan tetapi melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri N0 8/1990 tentang LSM, pemerintah kemudian berusaha mengspesifikasi Organisasi-organisasi yang termasuk LSM dengan mengenalkan definisi LSM yang baru, yakni organisasi yang di bentuk secara sukarela oleh warga Negara Indonesia berdasarkan kepentingan bersama, hobi profesi, atau tujuan dalam kegiatan tertentu yang di bentuk oleh organisasi dengan tujuan partisipasi social dalam kegiatan peningkatan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan penekanan pada pelayanan swadaya.

Menilik pada dua devinisi versi pemerintah tersebut, maka LSM dan Ormas hanya di bedakan dalam tujuannya, dan bukan di bedakan atas dasar sifat organisasinya. perbedaan penting antara LSM dan ormas yang diajukan oleh Lubis (1993). menurutnya, perbedaan dua tipe organisasi tersebut secara sederhana dapat dilihat dari orientasi keorganisasiannya. Ormas biasanya lebih menekankan pada keanggotaan sedangkan LSM memberikan tekanan pada aktifitas atau isu

tertentu. Ormas mempunyai akses langsung kemasyarakat, sedangkan LSM biasanya tidak memiliki akses semacam itu. Lubis mendefinisikan LSM sebagai NGO kecil yang berorientasi pada aksi dan biasanya tidak mempunyai basis keanggotaan.

Secara umum Ormas dapat di bagi lagi menjadi organisasi yang berhubungan dengan bisnis seperti Kadin (Kamar dagang dan industri dan asosiasi-asosiasi bisnis lainnya), organisasi yang di bentuk dan di jalankan oleh pemerintah (seperti KNPI-Komite Nasional Pemuda Indonesia, SPSI-serikat perkerja seluruh Indonesia, HKTI-himpunan kerukunan tani Indonesia), serta organisasi masyarakat yang benar-benar otonom. bentuk yang disebut terakhir tersebut mencakup koprasi, organisasi pemuda dan pelajar, profesi, akademik, kewargaan, organisasi berbasis agama, hobi dan organisasi yang berorientasi ,cultural dan rekreasional.

Pada kenyataannya dalam kontek kegiatan pembangunan, Ormas dan LSM sering memiliki kesamaan dalam kegiatan dan tujuan. beberapa Organisasi Agama seperti NU (Nahdatul Ulama), Muhammadiyah, PGI (Persatuan gereja Indonesia) dan KWI (Konfrensi Waligereja Indonesia), secara khusus melakukan fungsi di luar orientasi mereka yang berupa penyebaran ajaran agama (dakwah). didorong oleh tujuan dan misi untuk mengimlementasikan prinsip ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. organisasi tersebut merumuskan dan menerapkan berbagai program untuk mengatasi permasalahan umat, seperti kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan dan sebagainya. dalam hal ini pada masa tingkat tertentu mereka berfungsi seperti layaknya MSOs (membership support organization) di amerika latin, dan karenanya mereka juga menjadi bagian

dari agen pembangunan. mereka biasanya mendirikan yayasan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sector pembangunan-pembangunan lainnya. dengan membentuk berbagai Yayasan, Muhammadiyah misalnya memiliki berbagai macam lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan Universitas, dan juga memiliki banyak rumah sakit dan poliklinik.

Lebih jauh organisasi-organisasi keagamaan ini membentuk NGO perantara .sebagai contoh Lakpesdam NU (Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia), YKS-paramita, LOPS (lembaga Oikemene Pembangunan swadaya), dan LPPS (Lembaga penelitian dan pengembangan social) adalah beberapa NGO berorientasi pembangunan yang didirikan oleh secara berurutan, NU, WALUBI, PGIdan KWI. NGO-NGO tersebut secara cultural merupakan bagian dari organisasi yang berbasis agama. di samping itu, terdapat pula NGO berorientasi pembangunan yang secara cultural di asosiasikan dengan organisasi berbasis keagamaan .P3M dan LKiS biasanya berhubungan dengan NU, sedangkan yayasan bina swadaya YSS (yayasan sogyopranoto) terkait erat dengan gereja katolik .

Berkaitan dengan pembentukan dan asal usulnya , Raharjo (1999:xx) membedakan NGO berorientasi pembangunan menjadi tiga macam, yaitu (i) NGO yang di bentuk secara independene oleh individu atau aktifis, (ii) NGO yang di bentuk oleh organisasi berbasis agama dan (iii) NGO yang didirikan oleh pemerintah. Akan tetapi meskipun tipe NGO pertama banyak di ilhami oleh prinsip agama namun dalam praktiknya di temukan berbagai aktifitas dan

kepedulian yang bersilangan antara organisasi kemasyarakatan dan LSM/NGO dan berbagai tipe LSM/NGO seperti yang di jelaskan di atas.

Studi ini berfokus pada DJANGOs (Constantino David,1998),atau NGO kecil berorientasi aksi (LSM) (Lubis,1993).sayangnya hingga kini belum ada consensus tentang istilah yang tepat untuk menyebut NGO tipe ini. Mayoritas NGO atau pemerintah lebih suka menggunakan istilah LSM. Meskipun mereka berbeda dalam menginterpretasikan dan menggunakan istilah tersebut. Bagi aktifis NGO, LSM hanya mengacu kepada NGO yang tidak memiliki basis keanggotaan dan berorientasi pada pembangunan. Bagi pemerintah, ada tendensi untuk menggeneralisir semua organisasi di luar pemerintah,sector bisnis,akademik dan partai politik sebagai LSM.oleh karena itu menurut pemerintah istilah LSM dapat mencakup organisasi-organisasi yang didirikan oleh pemerintah seperti KUD,LKMD,PKK,dsb.organisasi semacam itu sebenarnya merupakan organisasi semi pemerintah atau organisasi non pemerintah yang di selenggarakan oleh pemerintah (GONGOs).pemerintah bahkan menganggap organisasi-organisasi yang di dasarkan pada keanggotaan atau memiliki akses langsung ke masa sebagai LSM, kendati organisasi seperti itu lebih tepat di sebut sebagai organisasi organisais masa (Lubis,1993:211).disisi lain, kalangan NGO yang berorientasi advokasi secara ekplisist menyebut diri mereka dengan istilah Ornop (organisasi non pmemrintah) sebagai terjemahan langsung dari istilah NGO.akibatnya secara ekuivalen istilah NGO/LSM/LPSM bisa di pakai secara bergantian oleh pemerintah dan NGO di Indonesia.

Untuk menghindari terminology yang saling bertentangan semacam itu,

... dan ini merupakan istilah NGO tidak berbasis keanggotaan yang dan

berorientasi pembangunan, untuk menyebut jenis NGO tidak memiliki basis keanggotaan dan terlibat dalam berbagai isu-isu pembangunan, seperti kemiskinan, kesejahteraan, dan kehidupan ekonomi komunitas, lingkungan, jender, HAM, good governance, penguatan masyarakat sipil dan sebagainya. NGO ini adalah organisasi formal yang beroperasi dengan staf yang berkerja penuh waktu dan terkadang dengan para relawan. NGO tersebut menyediakan berbagai pelayanan, mulai dari pelayanan langsung kepada masyarakat sampai pelayanan bantuan hukum, pengobatan, advokasi dan penelitian.

Dalam konteks Indonesia istilah NGO di gunakan untuk menyebutkan NGO jenis tersebut. NGO jenis ini eksis dan tersebar di seluruh Indonesia. Khususnya di beberapa daerah dan kota seperti Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Medan, Aceh, Pontianak, ujung Pandang dan sebagainya. akan tetapi NGO besar yang vocal dan berpengalaman umumnya berbasis di Jakarta. Beberapa NGO dan koalisinya menempatkan secretariat dan kegiatan utamanya di Jakarta, karena memang kenyataannya banyak NGO berpusat di Jakarta atau setidaknya di pulau jawa¹².

3. Rehabilitasi

Rehabilitasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika sebuah problematika kehidupan baik dalam wialyah fisik maupun non fisik yang sering terjadi di masyarakat. BN. Marbun mengartikan Rehabilitasi adalah pemulihan

¹² Subandjo, menurut Demokrasi Tiera Wacana 2005, hal 81-82

Menarik Diri

Memang ini sesuatu yang sulit dilakukan oleh banyak NGO, karena factor ketergantungan masyarakat, tetapi dewasa ini NGO sebelum terjun kemasyarakat yang paling di perhatikan adalah bagaimana masyarakat tidak tergantung dengan pemberdayaan yang di berikan oleh organisasi mereka, mereka berusaha membuat masyarakat agar bisa mandiri, dan biasanya NGO yang bergerak di bidang kesejahteraan social memakai target bagaimana rakyat bisa mandiri dan mereka sewaktu-waktu bisa meninggalkannya.

Penyebaran pengalaman

Biasanya NGO saling berbagi pengalaman antar lembaga bahkan dengan pemerintah setiap proyek yang berhasil mereka kerjakan, mekanisme ini sungguh memberikan hal yang sangat positif di dalam menciptakan pembangunan yang lebih baik di masa mendatang, bagi setiap stakeholder di manapun.

2.4. hubungan NGO dengan Pemerintah

NGO dan pemerintah masing-masing memiliki keunggulan dalam menjalankan pembangunan, keunggulan ini kadang bisa melengkapi kalau di kolaborasikan untuk mencapai pembangunan yang lebih baik. Namun kenyataan di lapangan mengatakan lain, terkadang NGO yang di percayakan oleh pemerintah sering bersikap ragu-ragu untuk bertindak, karena factor kepercayaan antara NGO pemerintah sangat lemah. disini kita perlu melihat NGO dan pemerintah bukan sekedar sebagai organisasi yang melaksanakan suatu fungsi, tetapi juga sebagai organisasi manusia yang di dalamnya mempunyai identitas, tujuan dan terutama sekali mempunyai sejarah social sendiri sendiri bahkan masing-masing memakai

dari agen pembangunan. mereka biasanya mendirikan yayasan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sector pembangunan-pembangunan lainnya. dengan membentuk berbagai Yayasan, Muhammadiyah misalnya memiliki berbagai macam lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan Universitas, dan juga memiliki banyak rumah sakit dan poliklinik.

Lebih jauh organisasi-organisasi keagamaan ini membentuk NGO perantara .sebagai contoh Lakpesdam NU (Lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia), YKS-paramita, LOPS (lembaga Oikemene Pembangunan swadaya), dan LPPS (Lembaga penelitian dan pengembangan social) adalah beberapa NGO berorientasi pembangunan yang didirikan oleh secara berurutan, NU, WALUBI, PGIdan KWI. NGO-NGO tersebut secara cultural merupakan bagian dari organisasi yang berbasis agama. di samping itu, terdapat pula NGO berorientasi pembangunan yang secara cultural di asosiasikan dengan organisasi berbasis keagamaan .P3M dan LKiS biasanya berhubungan dengan NU, sedangkan yayasan bina swadaya YSS (yayasan sogyopranoto) terkait erat dengan gereja katolik .

Berkaitan dengan pembentukan dan asal usulnya , Raharjo (1999:xx) membedakan NGO berorientasi pembangunan menjadi tiga macam, yaitu (i) NGO yang di bentuk secara independene oleh individu atau aktifis, (ii) NGO yang di bentuk oleh organisasi berbasis agama dan (iii) NGO yang didirikan oleh pemerintah. Akan tetapi meskipun tipe NGO pertama banyak di ilhami oleh prinsip agama, namun dalam prakteknya, di temukan berbagai aktifitas dan

nama baik atau kehormatan seseorang yang telah di tuduh secara tidak mendasar atau di langgar kehormatannya¹³.

Dalam kontek Rehabilitasi Aceh merupakan usaha pemulihan setelah terjadi gempa dan Tsunami menyangkut fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, kantor pemerintahan, rumah penduduk yang roboh dan penataan kembali sanitasi dan jaringan listrik yang terputus, sementara nonfisik menyangkut pemulihan mental masyarakat yang mengalami trauma baik tahap ringan maupun kritis.

Dalam kontek rehabilitasi penulis akan mencoba menelusuri bagaimana peran JRS untuk kegiatan pemulihan-pemulihan yang di lakukan setelah gempa dan tsunami tersebut, sehingga memberikan gambaran yang signifikan terhadap proses-proses pemulihan Aceh pasaca Tsunami.

Dalam kegiatan ini akan lebih di sorot menyangkut kegiatan jangka pendek untuk mendukung proses jangka panjang menuju Rekontruksi, sehingga lebih di gambarkan terhadap penanganan pemulihan sementara seperti penanganan pengungsi, pendidikan darurat, sanitasi sementara, jembatan dan srana jalan raya.

4. Rekonstruksi

Rekontruksi merupakan pengembalian seperti semula, menjadi lebih baik. Secara umum di katakan bahwa Rekontruksi mengembalikan Aceh dari kehancuran menjadi lebih baik dari sebelumnya, yang di awali dari Rehabilitasi.

¹³ BNI Media, Kompas Politik, Jakarta, 2005, hal. 400

Pengembalian itu di lakukan dengan beberapa program kebijakan menyangkut dengan kepentingan umum dan pribadi.

*** Arah kebijakan Rehabilitasi dan Rekontruksi**

Kebijakan dan Rehabilitasi dan Rekontruksi dapat di rinci dalam kebijakan umum dan kebijakan strategic¹⁴:

>. Kebijakan Umum:

- a. Pemulihan standar pelayanan minimum
- b. Perbaikan fasilitas fisik
- c. Rehabilitasi social
- d. Pemulihan hak atas tanah
- e. Pemulihan kondisi keamanan
- f. Pemulihan sistem secara keseluruhan terhadap daerah yang terkena dampak.
- g. Penyatuan program-program dalam pendekatan pembangunan daerah.

>. Kebijakan strategi

- a. Penilaian kebutuhan terhadap kebutuhan minimal dari seluruh sector penting.
- b. Penetapan program-program prioritas.
- c. Pembangunan kembali system ekonomi produksi (produksi, perdagangan dan perbankan).
- e. Pemberdayaan sistem social budaya.
- g. Penguatan sistem kelembagaan

¹⁴ Sitrini dera amalia Ilmu Pemerintahan UIMV 2005

E. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional merupakan sesuatu pembatasan antar satu konsep dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalah pahaman. Definisi konsepsional yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

1. Peran

Kegiatan sesuatu lembaga atau individu untuk melakukan tugas-tugas utamanya, atau suatu konsep perihal apa yang dapat di lakukan oleh individu atau organisasi dalam masyarakat.

2. NGO

NGO adalah Organisasi nirlaba yang terpisah dari pemerintah, dan aktif dalam isu-isu social yang memiliki ruang lingkup Internasional, organisasi ini di bentuk secara sukarela berdasarkan untuk merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat di sebuah Negara.

3. Rehabilitasi

Usaha memulihkan kondisi Aceh pasca gempa tsunami yang porak-poranda seperti semula, terutama terhadap fasilitas umum: infrastruktur public, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

4. Rekonstruksi

Upaya berkelanjutan dari Rehabilitasi untuk mengembalikan kondisi Aceh menjadi lebih baik dari yang semula

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini lebih di fokuskan pada bagaimana kita melihat peran JRS (Jesuit Refugees service) dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh pasca Tsunami.

Peran JRS dapat di lihat dari program kerja masing-masing Devisi berdasarkan permintaan masyarakat yang bersifat fisik dan non fisik. adapun program JRS di dalam proses rehabilitasi dan rekontruksi tersebut adalah:

***. Rehabilitasi**

•Rehabilitasi Fisik,meliputi:

1. Sektor peningkatan pendapatan masyarakat (IGA);
 - Pertanian
 - Perikanan
 - dan pengembangan usaha kecil

•Rehabilitasi non fisik meliputi:

1. Sektor Pendidikan;
 - Support Sekolah.
 - pendidikan alternatif bagi anak-anak korban Tsunami.
 - dan pembinaan Taman Pengajian Al-Quran.
2. Sektor Kesehatan
 - Pengobatan masal dan Individu
3. Advokasi
 - Mendampingi pengungsi untuk memperoleh hak-haknya

***Rekontruksi**

Rekontruksi pembangunan infrastruktur meliputi:

1. Perumahan
2. Pesantren
3. Gedung Sekolah

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Metode yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif yang menitikberatkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan mencari sebab akibat dari fenomena yang di teliti . tujuan penulisan biasanya menjadi alasan dari pelaksanaan penulisan penelitian.

Penelitian kualitatif biasanya menggambarkan suatu keadaan apa yang terjadi di suatu objek tetentu. Penelitian kualitatif juga sering dikatakan sebagai perangkat tafsir fenomena social, penelitian kualitatif tidak mengistimewakan salah satu metodologi terhadap metodologi yang lain, metode ini sulit untuk dedefinisikan secara pasti, karena penelitian kualitatif tidak memiliki paradigma tersendiri, dan juga tidak memiliki seperangkat metode tertentu yang sepenuhnya menjadi miliknya yang khas. Para periset kualitatif menggunakan semiotika, narasi, isi, diskursus, arsip, analisis, fonemik bahkan statistic. disisi lain para periset kualitatif juga menggunakan pendekatan, metode dan teknik-teknik etnometodologi, fenomenologi, hermeneutic, feminisme, rhizomatik, dekontruksionimisme, etnografi, wawancara, psikoanalisis, studi budaya, penelitian survey, dan pengamatan¹⁵.

Lebih jauh Natsir mengatakan bahwa penelitian kualitatif sering di sebut deskriptif untuk menggambarkan sesuatu fenomena secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.¹⁶ sementara Hadari Nawawi mengatakan bahwa metode kualitatif merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya¹⁷.

Selanjutnya Winarno Surahmad mengatakan bahwa ciri-ciri yang terdapat pada penelitian kualitatif adalah : pertama, memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah actual dan kedua data-data yang di kumpulkan pertama-tama di susun , di jelaskan dan kemudian di analisa¹⁸.

Pada ahirnya oprasional penelitian deskriptif ini berkisar pada pengumpulan data yang selanjutnya di susun, di olah, di tafsirkan kemudian, data yang telah di olah tersebut di beri makna rasional dengan mematuhi prinsip-prinsip logika untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan kritis.

2. Unit Analisis

Di dalam riset ini menyangkut dengan peran NGO JRS (Jesuit Refuges Service) dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh pasca Tsunami, maka

¹⁶ Moh.Natsir, metodologi penelitian, ghalia Indonesia 1983, hal.105

¹⁷ Hadari nawawi, metodélogi penenlitian , gajah mada university press, 1987 hal 63

¹⁸ Winarno surahmad, konsep dan prosedur penelitian ilmiah, dasar metode dan teknik, jember

unit analisisnya adalah pengurus dan program kerja JRS untuk pemulihan Aceh. Sehingga dapat di ketahui factor-faktor yang mempengaruhi peranan JRS terhadap pemulihan Aceh pasca Tsunami.

3. Data yang di butuhkan

Ada dua jenis data dalam penelitian ini yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui (perantara). Data primer dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok (jawaban responden) meliputi indicator-indikator yang akan di uji pengaruhnya , serta hasil observasi terhadap kegiatan-kegiatan atau kejadian dan hasil pengujian pengujian yaitu bagaimana peran JRS (Jesuit refuges service) dalam proses Rehabilitasi dan Rekontruksi Aceh pasca Tsunami. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diambil dari dokumentasi mengenai lokasi penelitian baik di publikasikan maupun yang tidak di publikasikan¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Natsir di definisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan²⁰. Sesuai definisi tersebut teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara, dokumentasi dan observasi.

a. Wawancara

karena penelitian ini adalah memakai metode kualitatif, wawancara merupakan salah satu kebutuhan mutlak untuk melengkapi sejumlah informasi dan data akurat. Di dalam wawancara tersebut akan berlangsung dari alur umum ke alur khusus, dimana wawancara pertama biasanya hanya bertujuan untuk memberikan deskripsi dan orientasi awal periset perihal masalah dan subjek yang di kaji sehingga akan memberikan informasi yang mendalam dari orang yang bersangkutan.

b. Dokumentasi

secara sederhana Basuki mendefinisikan dokumentasi adalah kegiatan yang menyangkut dokumen. Dokumen adalah wahana seperti buku, citra, foto, atau rekaman suara sebagai komunikasi langsung. Dokumentasi dalam penelitian ini lebih di utamakan untuk memperoleh data-data sekunder yang di butuhkan untuk mendukung data primer²¹.

c. Observasi

Observasi merupakan kata lain dalam istilah investigasi langsung ke sesuatu objek yang di teliti, namun peneliti tidak ikut terlibat dalam dinamika tersebut namun hanya menjadi pemantau untuk mengumpulkan data akurat sesuai dengan informasi yang berkembang²². observasi akan menjadi sumber informasi penting dalam penelitian kualitatif, dimana di situlah akan di temukan secara detail berbagai gambaran tingkah laku, kinerja atau keadaan masyarakat secara luas di suatu wilayah.

²¹ Skripsi dara amalia, hal 35 2005

²² ... hal 14 15

Observasi yang sering dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah observasi melihat. Di samping itu terdapat berbagai observasi yang masing-masing menyangkut beberapa isu yakni, 1. tingkat keterlibatan periset, 2. focus yang diamati, 3. sikap periset, 4. lama pengamatan. Dan ada pula periset yang menutup identitasnya atau melakukan observasi secara pasif, sesuai dengan kebutuhan dan konteks dalam sebuah penelitian.

Di dalam penelitian ini penulis akan memakai observasi terlibat secara langsung di dalam kegiatan JRS (Jesuit refugees Service) dimana akan terlibat secara langsung dalam setiap program kerja mereka di lapangan, sehingga penulis dapat mengamati dengan jelas segala yang dilakukan oleh JRS dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca Tsunami.

5. Teknik Analisis Data

Dalam setiap penelitian kualitatif, maka data yang di kumpulkan mula-mula di susun, di jelaskan, kemudian di analisa. Secara tegas langkah-langkah pengujian hipotesa yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. pengumpulan data
- b. penilaian data
- c. penafsiran data
- d. penyimpulan data

berawal dari usaha pengumpulan data-data yang diperlukan yang di peroleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi selanjutnya di lakukan penilaian data. Penilaian data di dasarkan pada prinsip validitas dan readibilitas. Penafsiran

atau interpretasi data adalah proses yang dilakukan untuk memahami makna dari data yang telah dikumpulkan.

pola mencari hubungan antara berbagai konsep. Penafsiran setidaknya adalah menyusun data, dimaksudkan sebagai usaha memilih dan menggolongkan data dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data-data tersusun maka di lakukan interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data, dalam kegiatan ini juga termasuk uji hipotesa.

Interpretasi sebagai langkah untuk mendapatkan kebenaran hakikatnya lebih di dasarkan pada pengetahuan dan perspektif subjektif peneliti. Hasil interpretasi tersebut belum sepenuhnya benar. Untuk memperoleh kebenarannya maka interpretasi itu harus di uji oleh orang lain dalam berbagai situasi dan kondisi. Kegiatan terakhir setelah di lakukan analisa data adalah usaha untuk menarik kesimpulan, sebagai rangkaian dalam pelaporan hasil peneliti.

6. Lingkup dan Batasan Penelitian

Tulisan ini akan menyoroti berbagai aktifitas dan program kerja yang di lakukan JRS (*Jesuit Refugees Service*) dalam proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh pasca tsunami.

Dimana Peran JRS di Aceh dalam kurun waktu beberapa tahun telah berkembang di beberapa kabupaten sehingga bisa dikatakan JRS telah masuk di hampir setiap sektor strategis masyarakat, dimana basis masyarakat korban konflik dan korban tsunami. JRS dalam hal ini membagi dua Area Project yaitu area I terdiri dari: Site Banda Aceh, Pulo Aceh dan Lamno sementara untuk Area II terdiri dari: Site Langsa, Tapak Tuan dan Meulaboh. Mengingat besarnya peran JRS di Aceh maka lingkup penelitian ini yaitu hanya meneliti

Pertanyaannya mengapa penulis lebih memilih Area 1 untuk melakukan penelitian ini, karena di sebabkan untuk Area 2 JRS lebih banyak menangani masalah-masalah reintegrasi dan bantuan korban konflik, pertimbangan itu kemudian penulis memilih untuk meneliti wilayah area 1 saja yang nobenanya IDS lebih berkonsentrasi untuk membantu korban Tsunami